SMART SOLUTION : DEVELOPING STUDENTS' HUMAN RIGHT AWARENESS BASE MINANGKABAU' CULTURE

Akmal¹, Azwar Ananda, Henni Muchtar, Ismail Suardi Wekke

*Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNP
Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang 25131
Telp/fax.0751-, 7055671, 7055628
E-mail: akmalmarlis@gmail.com*

Presented in
International Conference On Civic Education
Universitas Negeri Padang, Indonesia, October 2-5, 2017

ABSTRACT

The purposes of this research are to: (1) analyze the students' legal and human rights awareness phenomenon, (2) seek models in building students' human rights awareness. The methodology used is qualitative and quantitative research, the location of this research is in all State Senior High School and Private City of Padang with proportional random sampling. The results showed 1) Students' awareness is still low, in terms of norms, values, laws, basic human rights, other people's rights, applied regulations, social systems, religion, and public order. Attitude is in terms of spiritual and social meaning. Skills are in using norms and values, unravel, arranging, modifying, socialization modeling, writing and reading socialization model, calculating modeling, drawing and composing socialization model. 2). The model used in building students' human rights awareness is by considering the substance, structure, and culture, as well as law enforcement, supporting facilities. There is a very close relationship between law enforcement, supporting means, culture and law. Based on the data, from 700 participants who got the evaluation questionnaire as many as 475 people (67.85%) have a good perception of school rules in terms of substance, structure, and law obedience culture. While as many as 447 people (63.85%) said law enforcement (orderliness) is less consistent by the enforcement of the rules. To conclude, the students' law and human rights awareness determines the nation character formation in the future, which will give birth to good advocator and mediator.

Keywords: Smart Solution, Developing Students, Human Rights Awareness, Minangkabau' Culture

SOLUSI CERDAS: MENGEMBANGKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA BERBASIS BUDAYA MINANGKABAU DI INDONESIA

ABSTRAK

Tujuan penelitian: (1) menganalisis fenomena kesadaran hak asasi manusia siswa, (2) Mencari model dalam mengembangkan kesadaran hak asasi manusia siswa berbasis budaya Minangkabau. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, lokasi penelitian ini dilakukan di semua SMA Negeri dan Swasta Kota Padang dengan pendekatan proporsional random sampling. Hasil penelitian menunjukkan 1). Kesadaran HAM siswa masih rendah, ditinjau dari kepatuhan pada: norma, nilai, hukum, hak dasar manusia, kewajiban dasar manusia, hak orang lain, peraturan yang berlaku, sistem sosial yang hidup, agama, ketertiban umum. Untuk sikap (spiritual dan sosial). Keterampilan (norma dan nilai, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat model sosialisasi, menulis dan membaca model sosialisasi, menghitung menerapkan model, menggambar dan mengarang model sosialisasi). 2). Model mengembangkan kesadaran HAM siswa dengan mempertimbangkan substansi, struktur, dan budaya hukum, serta penegak hukum, dan sarana pendukung pada budaya Minangkabau. Berdasarkan data, dari 700 peserta yang diedarkan angket evaluasi diperoleh keterangan sebanyak 67,85% siswa memiliki persepsi yang baik terhadap peraturam tata tertib sekolah ditinjau dari aspek substansi, struktur, dan budaya kepatuhan hukum. Berdasarkan data 63,85% siswa mengatakan penegakan hukum terutama tata tertib kurang konsisten oleh pihak penegak aturan. Kesimpulan artikel ini adalah kesadaran HAM siswa menentukan pembentukan watak atau *character building* bangsa ke depan, karena dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, berkembang dalam suasana budaya lokal yang masih hidup. Ada 4 bentuk tataran nilai adat minangkabau sebagai kearifan lokal: *adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, adat istiadat*.

Kata Kunci : Solusi Cerdas, Mengembangkan, Kesadaran HAM, Budaya Minangkabau.

A. INTRODUCTION

Tantangan yang dihadapi generasi muda Indonesia pada umur SMA adalah kurang kesadaran akan hak asasi manusia, sehingga tidak taat asas, tidak konsisten, sering melanggar kesepakatan bersama, dan yang paling berbahaya mudah masuk pada pemikiran-pemikiran yang melawan hukum seperti kekerasan, anti agama, radikalisme, terorisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Tujuan pendidikan Indonesia tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas spritual, emosional dan kepribadian. Asep Saefuddin dalam Rusman (2010), Wekke & Lubis (2016) menyatakan bahwa tuntutan lulusan sekolah seluruh starata, sedang dan akan terus menghadapi tantangan persaingan dunia kerja yang semakin ketat dan kompleks. Dunia kerja secara objektif akan menuntut suberdaya manusia yang profesional, berketerampilan (skillful), kreatif,

inovatif, mampu bekerjasama (*cooperative*) dalam tim, cepat, tepat, berkemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan dan tulisan.

Menurut BNSP (2011) kompetensi yang diharapkan dalam dunia pendidikan: berfikir kritis, bekerjasama dan berkomunikasi, pembaharuan, dan kontekstual dalam melihat daya saing bangsa, dengan berpijak pada wawasan kebangsaan. Pendidikan kesadaran HAM dalam matapelajaran PPKn diharapkan punya kemampuan mengatasi masalah dengan tidak melawan nilai kemanusiaan, cerdas dalam mencari solusi, taat asas, dan konsisten. Secara khusus tujuan pendidikan HAM melalui matapelajaran PPKn adalah: (1) kepatuhan pada nilai HAM, dengan mempertimbangkan hak orang lain, hukum yang berlaku, sistem sosial, nilai agama, dan ketertiban umum. Keterburukan bangsa pada generasi muda hari ini adalah tidak patuh pada nilai HAM, dimana pemahaman HAM belum dipahami melalui kewajiban menghormati hak orang lain, hukum yang berlaku, sistem sosial, nilai agama, dan ketertiban umum (*International Human Rights Law, ICPCR and ICECR, 2005*). Termasuk perkembangan teknologi (Wekke & Hamid, 2013).

Ketidakpatuhan siswa terhadap HAM terlihat pada pelanggaran regulasi yang dibuat sekolah (Hasil penelitian: Akmal, 2013, Sufyarman M, 2003, Pushman UNP, 2011 dan Komnas HAM Perwakilan Sumbar, 2010), (1) melakukan kekerasan, (2) tidak memahami tupoksi diri dan organisasi seperti; kelompok belajar, kelas, dan osis, sekolah, (2) ketidak teraturan dalam pembelajaran, seperti kehadiran, pembuatan tugas, (3) ketidak teraturan dan sistematika dalam berpikir dan berbuat, yang tercermin dalam diskusi, bertanya dan menjawab. Hal senada diungkapkan pada studi Akmal (2009) bahwa kecenderungan siswa melanggar tata tertib sekolah sebagai hal yang biasa serta ada unsur pembiaran (*volation by Omission*) dari sekolah, orang tua atau wali siswa.

Kajian Teori

Hakekat Kesadaran HAM

Kesadaran HAM merupakan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia (Duham 1948, Konvensi Utama HAM 1966, UU 39/1999). Kesadaran akan hak dasar manusia wajib diimbangi dengan kewajiban dasar manusia sebagai syarat terlaksananya hak dasar tadi sebagaimana diatur dalam UU yang berlaku. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita.

Fungsi Kesadaran HAM (*Human Rights Awareness*)

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran berasal dari kata sadar. yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti . Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti,

hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Menurut Soerjono Soekanto (2013) ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan hukum; seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum; seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Sikap hukum; seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola perilaku hukum; dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam membahas tentang kesadaran hukum masyarakat, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan undang-undang. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi positif dan negatif, ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo (2008) ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

1. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap

terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.

3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

Dalam usaha kita meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan kepatuhan ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan.

1. *Tindakan Represif*, ini harus bersifat drastis, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen.
2. *Tindakan Preventif*, merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum.
3. *Tindakan Persuasif*, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

Untuk itu yang akan dikaji dalam penelitian ini ada 3 aspek yaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman hukum
2. Sikap dan perilaku siswa
3. Keterampilan siswa (sesuai dengan tuntutan Kurikulum 13 pada bidang studi PPKn kelas XI SMA)

Model Kesadaran Hukum dan HAM Dengan Mempertimbangkan

Dalam membahas tentang faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat (peserta didik), terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan undang-undang. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau penghambat kesadaran hukum hukum dan HAM siswa, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang (Peraturan Tata Tertib Sekolah).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

B. Result And Discusion

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang (Peraturan Tata Tertib Sekolah). Yaitu menyangkut tentang : struktur, substansi, dan budaya hukum.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang substansi, struktur, dan budaya hukum adalah terlihat 67,85% siswa memiliki persepsi yang baik terhadap peraturam tata tertib sekolah ditinjau dari aspek substansi, struktur, dan budaya kepatuhan hukum. Berdasarkan lanjutan wawancara bahwa mereka kurang dilibatkan dalam pembuatan tata tertib sekolah.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Yang dimaksud dengan penegak hukum dalam penelitian ini adalah, sejauhmana kekonsistenan pimpinan sekolah, keamanan sekolah, guru wali kelas dalam menegakan hukum di sekolah.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang kekonsistenan pimpinan sekolah, keamanan sekolah, guru wali kelas dalam menegakan hukum di sekolah adalah terlihat 63,85%) siswa mengatakan penegakan hukum (tata tertib) kurang konsisten oleh pihak penegka aturan. Berdasarkan lanjutan wawancara bahwa kecenderungan kurang konsistern pada aturan yang bersifat hukuman ringan.

3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam penelitian ini adalah, sejauhmana ketersediaan sarana dan fasilitas sekolah dalam mendukung penegakan hukum di sekolah.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa 84,99%) siswa mengatakan ada ketersediaan sarana dan fasilitas sekolah dalam mendukung penegakan hukum di sekolah.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (orang tua, komite sekolah, lingkungan masyarakat)

Yang dimaksud dengan faktor masyarakat yang mendukung penegakan hukum dalam penelitian ini adalah, sejauhmana orang tua, komite sekolah dan lingkungan masyarakat sekolah dalam mendukung penegakan hukum di sekolah.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa 50,71%) siswa mengatakan kurang dukungan orang tua komite sekolah dan lingkungan masyarakat sekolah dalam penegakan hukum di sekolah. Meneurut siswa sering terjadi pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum oleh siswa.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Yang dimaksud dengan faktor kebudayaan, dalam penelitian ini adalah, sejauhmana kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi budaya sehingga penghambat dalam membangun kesadaran hukum siswa. 50,71%) siswa mengatakan kebudayaan tidak sebagai penghambat kesadaran hukum siswa di sekolah.

C. Conclusion

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

1. Ditinjau dari segi pengetahuan hukum dan HAM yaitu: norma, nilai, hukum, hak dasar manusia, kewajiban dasar manusia, hak orang lain, peraturan yang berlaku, sistem sosial yang hidup, agama, ketertiban umum, kecenderungan tingkat pengetahuan sedang. Sikap spiritual dan sosial baik. Keterampilan menggunakan norma dan nilai, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat model sosialisasi, menulis dan membaca model sosialisasi, menghitung menerapkan model, mengambar dan mengarang model sosialisasi, terhadap hukum dan HAM dari segi keterampilan tergolong baik.
2. Faktor Penghambat Kesadaran Hukum dan HAM

Faktor penghambat kesadaran hukum peserta didik, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan undang-undang. Berdasarkan data 67,85% siswa memiliki persepsi yang baik terhadap peraturan tata tertib sekolah ditinjau dari aspek substansi, struktur, dan budaya kepatuhan hukum. Berdasarkan data, 63,85% siswa mengatakan penegakan hukum (tata tertib) kurang konsisten oleh pihak penegka aturan. Berdasarkan lanjutan wawancara bahwa kecenderungan kurang konsistern pada aturan yang bersifat hukuman ringan. Berdasarkan tabel di atas, 84,99% siswa mengatakan ada ketersediaan sarana dan fasilitas sekolah dalam mendukung penegakan hukum di sekolah. Berdasarkan data, 50,71%) siswa mengatakan kurang dukungan orang tua komite sekolah dan lingkungan masyarakat sekolah dalam penegakan hukum di sekolah. Meneurut siswa sering terjadi pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum oleh siswa. Berdasarkan data, 50,71% siswa mengatakan kebudayaan tidak sebagai penghambat kesadaran hukum siswa di sekolah. Berdasarkan data, 67,85% siswa mengatakan pendekatan saintifik ikut membantu memahami. Yang direkomendasikan adalah: (1) Tingkat perbandingan kesadaran hukum dan HAM siswa adalah tergolong rendah, untuk itu perlu ditingkatkan terus dalam memacu kemampuan kesadaran hukum dan HAM berbasis kasus. Sehingga sikap dan keterampilan siswa juga akan tajam dalam menganalisa dan mudah melahirkan seorang advokator dan mediator yang baik. (2) faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat (peserta didik), terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan undang-undang. Untuk itu, semua unsur perlu bekerjasama dalam membentuk kesadaran hukum dan HAM siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, SH., Prof. Dt A.-,1977, Kesadaran hukum masyarakat, Hukum no.5 tahun ke 4 1977
 Akmal. 2010. *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktek*. UNP Press: Padang

- Asep Saefuddin. 2002. *Sistem Perencanaan Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan*, Makalah, Kerjasama PKSDM, UNP, IPB, 2002.
- Dept Pend.Nasional. 2000. *Panduan Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Guru SMU/MA*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional
- FH. Unand. 2008. *Kurikulum Pembelajaran Hukum*. Hasil Seminar Dosen Hukum Se Sumatera Barat: Fakultas Hukum Unand
- Kirkpatrick,D.L.1998. Evaisco: *Evaluating Training Programs:The four Levels (2nd ed)*. San Francisco: Berrett-koebler Publisher, Inc.
- L.C. Gay, Peter Airasian. 2000. *Educational Research. Competencies for Analysis and Application*. Sixth Edition: Columbus, OhioNew Jersey. Upper Saddle River.
- Lemaire, Dr. L.W.G.-,1952, Het recht in Indonesie, NV Uitgeverij W v \Hoeve s'Gravenhage
- Orlich,D.C,at al. 2007. *Teaching Strategies: A Guide to Effective Instruction*. New York: Houghton Mifflin Comoany.
- Post, C. Gorden-, 1963, An introduction to the law, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Pusham UII. 2007. *Metode Pembelajaran Hukum*. Kumpulan Makalah Pada Seminar Internasional kerjasama Oslo University dengan Pusham UII.
- Ronald J. Bonnstetter and Jon E. Pedersen. 2011. *The Jurisprudential Inquiry Model for STS* University of Nebraska and University of Oklahoma.
- Rose, Arnold M.-, 1975, The use of law to induce social change dalam Soerjono Soekanto: Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI
- Scholten, Mr. Paul-, 1954, Algemeen /Deel,, NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink
- Wekke, I. S., & Hamid, S. (2013). Technology on language teaching and learning: a research on Indonesian pesantren. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 83, 585-589.
- Wekke, I. S., & Lubis, M. A. (2016). A Multicultural approach in Arabic language teaching: creating equality at Indonesian pesantren classroom life. *Sosiohumanika*, 1(2).